

---

## **MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN PAMEKASAN**

**\*Rina Nur Azizah<sup>1)</sup>, Nur Fathin Luaylik<sup>2)</sup>, Erina Saputri<sup>3)</sup>**

1), 2), 3) Program Studi Administrasi Publik Universitas Madura, Indonesia

\*Email Korespondensi : [rina\\_nurazizah@unira.ac.id](mailto:rina_nurazizah@unira.ac.id)

---

*Diterima Redaksi: 10-07-2023 | Selesai Revisi: 14-09-2023 | Diterbitkan Online: 05-09-2023*

---

### **Abstrak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pamekasan berupaya menuntaskan kemiskinan, sasarannya adalah perempuan miskin. Tujuannya adalah mengembangkan kewirausahaan sendiri sehingga kehidupan perekonomiannya akan teratasi. Program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi lokal dapat diukur dengan menggunakan model Harvard karena model pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Pendekatan efisiensi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dengan secara langsung dari hasil wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian yang dicapai dengan membandingkan teori yang ada terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan. Indikator pertama Indikator keluaran (*output indicator*) dari beberapa program tersebut yang paling terlihat berhasil adalah program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Indikator kedua adalah Indikator hasil (*income indicator*) pada program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) menunjukkan keberhasilan program bahwa perempuan kepala keluarga mampu menunjang ekonomi berdasarkan kemampuan yang telah diperoleh dari program pemberdayaan tersebut. Indikator ketiga adalah Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai perempuan sasaran program PEKA sudah mampu mengembangkan ketrampilan mereka sehingga mampu hidup layak dalam menunjang perekonomian keluarganya.

**Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan; Kemiskinan; Kabupaten Pamekasan**

### **Abstract**

*Based on Regional Regulation of Pamekasan Regency Number 7 of 2019 concerning Poverty Management, Pamekasan Regency seeks to eradicate poverty, the target is poor women. The goal is self-entrepreneurship so that economic life will develop well. Local economy-based women's*

*empowerment programs can be measured using the Harvard model because the women's empowerment model in Pamekasan Regency is based on an efficiency approach. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The type of data collected in this study is qualitative data using primary data, namely data obtained directly from interviews with the Office of Women's Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning, Pamekasan Regency. The research results were achieved by comparing existing theories related to women's empowerment in improving women's welfare. The first indicator is the PEKA program (Empowerment of Female Heads of Family). The second indicator is the income indicator in the PEKA (Empowerment of Female Heads of Family) program, which shows the success of the program in that women heads of households are able to support the economy based on the capabilities obtained from the empowerment program. The third indicator is an impact indicator (impact indicator) which indicates that the target women of the PEKA program have been able to develop their skills so that they are able to live a decent life in supporting their family's economy.*

**Keywords:** *Women's Empowermen; Poverty, Pamekasan Regency*

## **PENDAHULUAN**

Perempuan saat ini tidak hanya berperan dalam satu pembangunan, hal ini bisa dilihat dari peran perempuan dalam lingkungan keluarganya yang mampu meningkatkan perekonomian keluarganya. Dikatakan peningkatan peran perempuan dalam hal peningkatan perekonomian keluarga mengarah pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan tantangan global karena secara tradisional perempuan masih berada dibawah kendali laki-laki. Perempuan tidak diharapkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dari tingkat domestik hingga nasional. Di tingkat keluarga, sikap yang menganggap laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih ada, yang membatasi suara perempuan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya domestik. Pada dasarnya pengarusutamaan gender (PUG) adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanismemekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Lebih nyata penyelenggaraan PUG

dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah pemenuhan jangka pendek, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta aksara dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan strategis merupakan kebutuhan jangka panjang, seperti perubahan posisi subordinasi perempuan dalam berbagai bidang ke dalam posisi setara dan adil gender. Pentingnya melaksanakan PUG di dalam berbagai bidang pembangunan bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan (Wiasti, 2017). Dalam penyelenggaraannya PUG bertujuan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategi kebutuhan gender. Tujuan PUG dalam bidang pembangunan adalah memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar memperoleh akses yang sama terhadap peningkatan perekonomian keluarga.

Pada awal tahun 2020 dunia mengalami kelumpuhan perekonomian, termasuk di Negara Indonesia. Karena kelumpuhan perekonomian diakibatkan oleh kehadiran Corona Virus atau yang disebut COVID-19. Covid-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini menular ke manusia yang menyebabkan peradangan saluran pernafasan (Pencegahan, 2020). Pandemi Covid-19 Banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Bukan hanya dalam permasalahan kesehatan, namun akibat dari pandemi ini juga mengganggu aktivitas masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu 4 Kabupaten di Pulau Madura yang termasuk terkena dampak pandemi covid-19. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang penanggulangan Kemiskinan pada bagian ketiga pasal 7 dijelaskan bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan mengupayakan hak masyarakat dalam Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan dan mengimplementasikan kebijakan melalui program pemberdayaan untuk memperhatikan kehidupan berkelanjutan yang layak. Kemiskinan yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda, kemiskinan yang terjadi di pedesaan berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di perkotaan. Kemiskinan yang terjadi di pedesaan disebabkan karena masalah pertanian, akan tetapi kemiskinan yang terjadi di perkotaan

disebabkan oleh beberapa masalah yang lebih kompleks. Salah satunya adalah kemiskinan yang terjadi di pedesaan sangat berpengaruh pada kemiskinan di perkotaan karena penduduk miskin yang ada di pedesaan menyebabkan arus migrasi semakin meningkat sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran di perkotaan semakin bertambah. Dalam menanggulangi kemiskinan ada beberapa upaya antara lain menyediakan kebutuhan dasar serta menyediakan perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah presentase masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 sebanyak 126 ribu jiwa lebih pada tahun 2021 atau 13,93 persen. (bps.go.id). Pasca Pandemi Covid-19 Kabupaten Pamekasan berupaya menuntaskan kemiskinan, terutama sasarannya adalah perempuan di wilayah Kabupaten Pamekasan, karena pemerintah Kabupaten Pamekasan merasa bahwa banyak jumlah perempuan yang menganggur dan tidak memiliki ketrampilan untuk memperoleh penghasilan. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan suatu program ekonomi kreatif salah satunya adalah program pemberdayaan perempuan. Menurut Hawkins, ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang input dan outputnya berupa gagasan. Ekonomi kreatif digerakkan oleh industri kreatif yakni industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu (Setyadi & Budiarto, 2020). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang kewirausahaan. Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka program pemberdayaan perlu dirancang dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya adalah guna mengembangkan kewirausahaan sendiri sehingga kehidupan perekonomiannya akan teratasi. Oleh sebab itu, ilmu pemberdayaan perlu diterapkan dalam mengembangkan kewirausahaan. Semua program pemberdayaan perempuan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan akan terlaksana dengan lancar. Dalam kajian administrasi publik, pemerintah berperan sebagai pelayanan dalam pembangunan dan pemberdayaan. Dalam fungsi pelayanan, pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat dalam menciptakan kemakmuran.

Program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pamekasan telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan Kesehatan, serta meningkatkan hidup kaum perempuan. Dalam berbagai Langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau biasa disebut kesetaraan gender, sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga yang mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun kesetaraan gender sudah dilakukan, namun masih terdapat banyak hal dalam kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender (Marwanti & Astuti, 2012).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu instansi pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pamekasan khususnya perempuan miskin, pemerintah melaksanakan kebijakan antara program pemberdayaan perempuan dalam membuka wirausaha baru. Sasaran dari program pemberdayaan tersebut utamanya adalah perempuan miskin yang tidak memiliki pekerjaan atau kerampilan. Tujuannya adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan perempuan agar dapat membuka wirausaha baru sehingga mampu meningkatkan ekonomi yang produktif guna menambah penghasilan keluarganya. Adapun pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan Kelompok Peningkatan Pendapatan Aseptor sasarannya adalah pasangan usia subur. Selain itu ada program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Salah satu kegiatan program pemberdayaan perempuan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan adalah mengembangkan kewirausahaan melalui pendampingan program dan pelaksana program berupa pelatihan.

Namun setiap program yang dilaksanakan tentunya tidak selalu berjalan mulus, ada kemungkinan terjadi kendala baik berasal dari internal dan eksternal. Masalah eksternal adalah dari SDM. Ibu Mamik selaku kabid Keluarga Sejahtera menjelaskan

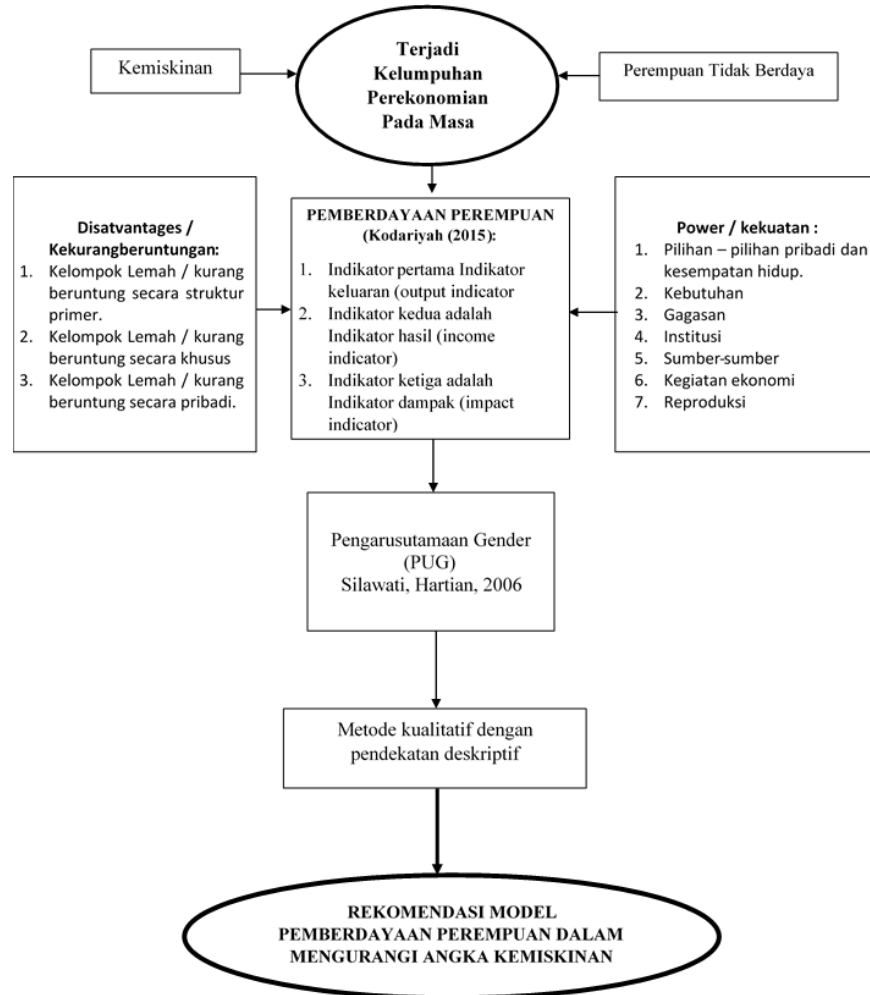
bahwa “perempuan yang mengikuti program ini rata-rata perempuan yang memiliki perekonomian rendah, oleh karena itu menjadi sasaran dalam pelaksanaan program”. (Wawancara tanggal 29 Juni 2023). Program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi lokal dapat diukur dengan menggunakan model Harvard karena model pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Kerangka ini adalah salah satu analisis yang digunakan yang digunakan dalam melihat gender dalam peran dan pembangunan. Kerangka Analisis Harvard dikembangkan pada tahun 1980an di Institut Hubungan Internasional Harvard. Kerangka kerja ini merupakan salah satu kerangka analisis dan perencanaan gender pertama. Kerangka Harvard ini bertujuan untuk memetakan perbedaan akses dan control antara perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya dalam suatu program pembangunan serta membantu merancang proyek yang lebih efisien (Nugraheni et al., 2012). Kerangka analisis Harvard digunakan untuk melihat peran perempuan dan laki-laki dalam suatu proyek pembangunan. di dalam kerangka ini dilihat apakah perempuan memiliki kontrol pada pembangunan tersebut. Dalam pengambilan keputusan perempuan dilibatkan dalam mengambil keputusan pada penggunaan sumberdaya.

Fenomena kemiskinan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan hal berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Pamekasan. Masyarakat Pamekasan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam mengembangkan ekonomi kreatif untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pamekasan, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai model rekomendasi pemberdayaan perempuan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Jadi penelitian tentang Model Pemberdayaan

Perempuan Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.



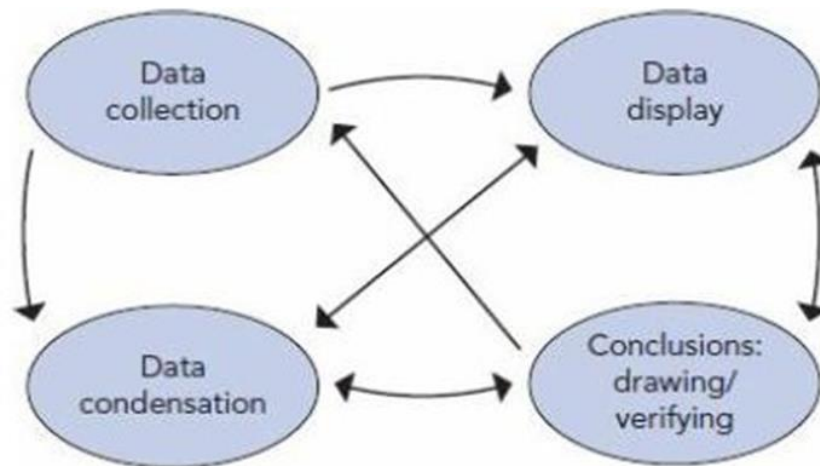
**Gambar 1. Kerangka Pikir Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan**

Sumber: Peneliti, 2023

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dengan secara langsung dari hasil wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yaitu Bapak Munapik, S.AG. M.Pd.i, selaku Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Pamekasan, Ibu Mamik selaku Kabid Keluarga



Sejahtera dan Bapak Suprpto selaku bendahara APBN. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang ditemukan dilapangan dari informan lebih mendalam. Serta menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan, catatan maupun data dari berita acara musyawarah dan laporan-laporan tertulis, seperti laporan hasil kegiatan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Data skunder yang diperoleh adalah bentuk laporan kegiatan program pemebrdayaan perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interatif Miles dan Humberman yang terdiri dari beberapa alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan / verifikasi (Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, 2014). Untuk lebih mudahnya, teknik analisis data diatas dapat digambarkan melalui sebuah skema, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2. Analisis Data Interaktif**

Sumber: (Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, 2014)



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dicapai dengan membandingkan teori yang ada terkait dengan pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan adalah sebuah program yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan terutama dibidang ekonomi dalam pencapaian sinergi pada sumberdaya manusia. Dalam program pemberdayaan perempuan ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan dimulai dengan peningkatan sumber daya dalam bidang ekonomi. Prioritas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam bidang ekonomi dan ironisnya perempuan di Kabupaten pamekasan sering mengalami ketidakadilan dalam pembagian peluang kerja sehingga perempuan dianggap tidak mampu meningkatkan sumber daya dalam bidang ekonomi. Program pemberdayaan dalam bidang ekonomi diharapkan mampu memperoleh akses dalam peningkatan perekonomian keluarga dan dapat berpartisipasi dalam bidang ekonomi di masyarakat.

Indikator dirumuskan oleh perempuan tentang bagaimana mereka membayangkan pemberdayaan dan jumlah sasaran perempuan memperoleh hasil tertentu menjadi contoh dalamn tujuan masing-masing (Esquivel et al., 2008). (Kodariyah, 2015) mengemukakan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan ditandai dengan adanya 3 indikator:

1. Indikator pertama **Indikator keluaran** (*output indicator*) menurut Kodariyah (2015 :19) menjelaskan bahwa berhasilnya pemberdayaan perempuan ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Munapik selaku Kepala Dinas P3AP2KB menjelaskan bahwa “Di bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2022 telah menyelenggarakan program Pemberdayaan perempuan, terdapat 115 kelompok usaha dalam peningkatan pendapatan aseptor. Sasarannya adalah pasangan usia subur.” (Wawancara, 27 Juli 2023). Selain itu Ibu Mamik selaku Kabid Kesejahteraan Perempuan menjelaskan bahwa “program pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan telah diselenggarakan beberapa program pemberdayaan perempuan. Dari beberapa program tersebut yang paling terlihat berhasil adalah program pemberdayaan perempuan program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). (Wawancara, 27 Juli 2023). Pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suprpto selaku bendahara APBN mengungkapkan bahwa “dengan adanya APBN setiap tahun diselenggarakan program pemberdayaan, salah satunya adalah program pemberdayaan perempuan. Akan tetapi setiap tahun tidak selalu program pemberdayaan perempuan saja, namun sesuai dengan masalah yang terjadi dilapangan lalu direncanakan sebuah program” (Wawancara, Tanggal 27 Juli 2023). Dalam indikator ini, program pemberdayaan perempuan sudah terlaksana, program yang ditawarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan antara lain PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) yang didalamnya terdapat program pelatihan dan TTG. Selain PEKA ada juga program pelatihan menu dapur sehat untuk mengatasi stunting. Pelatihan menjahit, membuat tas dari kain, membuat pot dari sabut kelapa, pemanfaatan ikan dan mangrove kopi dan teh. Dari beberapa program tersebut yang paling berhasil adalah program PEKA.

2. Indikator kedua adalah **Indikator hasil (*income indicator*)** ditandai dengan perempuan yang telah diberdayakan mampu berusaha menunjang ekonomi sesuai dengan keterampilan mereka, hal ini dapat dilihat pada program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) menunjukkan keberhasilan program bahwa perempuan kepala keluarga mampu menunjang ekonomi berdasarkan kemampuan yang telah diperoleh dari program pemberdayaan tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Munapik selaku Kepala Dinas P3AP2KB menjelaskan bahwa “dalam program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) perempuan kepala keluarga mampu mengembangkan ketrampilan yang diperolehnya sehingga mampu untuk menunjang ekonominya berdasarkan kemampuan yg dimiliki, dengan demikian perempuan kepala keluarga mampu mengatasi masalah ekonomi keluarganya” (Wawancara, Tgl 27 Juli 2023). Disamping itu Ibu Mamik selaku Kabid Kesejahteraan Perempuan menjelaskan

“Keberhasilan program PEKA ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga yang mengikuti pelatihan memang benar-benar ada keseriusan dalam melaksanakan programnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya ekonomi kreatif oleh perempuan kepala keluarga” (Wawancara, tanggal 27 Juli 2023).

3. Indikator ketiga adalah **Indikator dampak (*impact indicator*)** ditandai dengan perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, berorganisasi atau bermasyarakat dan membentuk perempuan lain guna mengembangkan keterampilan mereka. Pada indikator ketiga ini perempuan sasaran program PEKA sudah mampu mengembangkan ketrampilan mereka sehingga mampu hidup layak dalam menunjang perekonomian keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Dinas P3AP2KB Bapak Munapik menjelaskan bahwa “Ekonomi kreatif pada masa pasca pandemi sangat membantu masyarakat yang kondisi ekonominya menurun, oleh karena itu Dinas P3AP2KB mengadakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan, setelah mengadakan program diharapkan perempuan mampu mengembangkan ketrampilannya sehingga perempuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.” (Wawancara, 27 Juli 2027).

Pada indikator ini, perempuan sasaran program mampu mengembangkan ketrampilannya mulai membuat produksi makanan, mengemas dan memasarkan. Sehingga hasil produksinya menjadi nilai harga jual tinggi dan mampu menambah penghasilan keluarganya.

Dari beberapa program pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan yang paling berhasil adalah program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) hal ini dapat dilihat keberhasilan perempuan dalam mengembangkan ketrampilannya sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarganya. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) ini menggunakan model pemberdayaan Harvard, model ini melihat peran perempuan dan laki-laki dalam suatu proyek pembangunan. di dalam kerangka ini dilihat apakah perempuan memiliki kontrol pada pembangunan tersebut.

Kegagalan untuk memperhatikan ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga memiliki konsekuensi untuk mencapai tujuan pembangunan (Alkire et al., 2013) menggunakan indikator perbedaan usia, pendidikan, dan asset pada perkawinan antara suami dan istri dalam satu rumah tangga sebagai indikator *intrahousehold bargaining*. Usia suami dan senioritas pendidikan juga telah digunakan untuk berkonotasi kontrol laki-laki (Alkire et al., 2013). Perbedaan pendidikan dapat dipandang sebagai proksi dari perbedaan kekuatan penghasilan, yang mempengaruhi kekuatan tawar-menawar. Terdapat 4 indikator dasar pada kekuatan pengambilan keputusan yang relative terhadap pasangan laki-laki mereka : apakah perempuan bekerja untuk mendapatkan uang, usianya pada pernikahan pertama, perbedaan usia antara dia dan suaminya, dan perbedaan pendidikan antara dia dan suaminya.

Program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pamekasan meliputi program peningkatan ekonomi keluarga yang bertujuan untuk membentuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga, program PEKA (Perempuan Kepala Keluarga) sasarannya adalah janda atau perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, program pemberdayaan ekonomi dalam peningkatan ekonomi keluarga berupa pelatihan dan memberikan bantuan alat teknologi. Dan program yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi berbasis lokal yang berupa *ecoprin* (pelatihan membuat batik berbahan dasar daun). Model pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui model Harvard diharapkan dapat mendukung pelaksanaan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga

## **KESIMPULAN**

Dalam program pemberdayaan perempuan ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan dimulai dengan peningkatan sumber daya dalam bidang ekonomi. Prioritas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam bidang ekonomi dan ironisnya perempuan di Kabupaten pamekasan sering mengalami ketidakadilan dalam pembagian peluang kerja sehingga perempuan dianggap tidak mampu meningkatkan sumber daya dalam bidang ekonomi. Indikator dirumuskan oleh

perempuan tentang bagaimana mereka membayangkan pemberdayaan dan jumlah sasaran perempuan memperoleh hasil tertentu menjadi contoh dalam tujuan masing-masing. Kodariyah (2015:19) mengemukakan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan ditandai dengan adanya 3 indikator yaitu, Indikator pertama Indikator keluaran (*output indicator*) menurut Kodariyah (2015 :19) menjelaskan bahwa berhasilnya pemberdayaan perempuan ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap perempuan. Di bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2022 telah menyelenggarakan program Pemberdayaan perempuan, terdapat 115 kelompok usaha dalam peningkatan pendapatan aseptor. Indikator kedua adalah Indikator hasil (*income indicator*) ditandai dengan perempuan yang telah diberdayakan mampu berusaha menunjang ekonomi sesuai dengan keterampilan mereka, hal ini dapat dilihat pada program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) menunjukkan keberhasilan program bahwa perempuan kepala keluarga mampu menunjang ekonomi berdasarkan kemampuan yang telah diperoleh dari program pemberdayaan tersebut. Indikator ketiga adalah Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai dengan perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, berorganisasi atau bermasyarakat dan membentuk perempuan lain guna mengembangkan keterampilan mereka. Pada indikator ketiga ini perempuan sasaran program PEKA sudah mampu mengembangkan ketrampilan mereka sehingga mampu hidup layak dalam menunjang perekonomian keluarganya. Model pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui model Harvard diharapkan dapat mendukung pelaksanaan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

## **REFERENSI**

- Alkire, S., Meinzen-Dick, R., Peterman, A., Quisumbing, A., Seymour, G., & Vaz, A. (2013). The women's empowerment in agriculture index. *World Development*, 52, 71–91.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan. 2022. *Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan*. Pemkab Pamekasan.
- Esquivel, V., Budlender, D., Folbre, N., & Hirway, I. (2008). Explorations: Time-use surveys in the south. *Feminist Economics*, 14(3), 107–152.

- Kodariyah, S. N. (2015). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI AGROWISATA KAMPUNG SAYUR DI PILAHAN REJOWINANGUN KOTAGEDE YOGYAKARTA*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Marwanti, S., & Astuti, I. D. (2012). Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 9(1).
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*.
- Nugraheni, W., Marhaeni, T., & Sucihatningsih, D. W. P. (2012). Peran dan potensi wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga nelayan. *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 1(2).
- Pencegahan, P. (2020). Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). *Revisi Ketiga Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19), Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (P2P)*, 16.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 7 Tahun 2019 tentang penanggulangan Kemiskinan
- Setyadi, S., & Budiarto, M. S. (2020). Potensi Dan Prioritas Industri Kreatif Skala Mikro, Kecil Dan Menengah Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(2), 118–128.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (pug). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.